

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, AGLOMERASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Liling Vera Yusica¹⁾, Nazaruddin Malik²⁾, Zaenal Arifin³⁾

Abstract: *The purpose of this study is to analyze regional inequality and analyze the effect of economic growth variables, agglomeration and unemployment rate on regional inequality in East Kalimantan Province. The analysis tool used is panel data regression analysis. Based on the PDRB per capita analysis the level of regional inequality in East Kalimantan province still shows weak regional inequality because the average still shows negative number. From the results of research can be explained that the variable of economic growth have a negative and significant effect on regional inequality as well as agglomeration variable and unemployment rate have a positive and significant effect on regional inequality.*

Keywords: *Agglomeration, area stability, economic growth, unemployment rate*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan wilayah serta menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan analisis PDRB per kapita tingkat ketimpangan wilayah di provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wilayah yang lemah karena rata-rata masih menunjukkan angka negatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Kata kunci: Aglomerasi, Ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mencapai kehidupan suatu masyarakat menjadi lebih baik dalam peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang pokok, peningkatan standar hidup secara sosial dan ekonomis baik peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan yang lebih baik (Todaro, 2004). Proses pembangunan yang berorientasi pada otonomi daerah, berarti penyerahan proses pembangunan secara utuh kepada Kabupaten/Kota, namun demikian dalam pembangunan ekonomi masih diperlukan intervensi pemerintah (Nuraini, 2017). Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai (Arifin, 2009). Jurang pembangunan dapat mengecil kembali saat daerah yang kaya sudah semakin berkembang (Lailatul Khusnah, 2015). Ketimpangan tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

¹ [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [liling.yusic95@gmail.com]

² [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [nazfadjar@yahoo.com]

³ [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [azainala@yahoo.com]

Ketimpangan pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari kontribusi PDRB suatu daerah (pertumbuhan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi selama ini dianggap sebagai jargon dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di Negara sedang berkembang termasuk juga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mutlak diperlukan untuk mendokrak laju pembangunan ekonomi. Sangat diyakini, bahwa hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka permasalahan pembangunan seperti, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pembangunan dapat diatasi melalui dampak merembes ke bawah (Susilowati, Sri, & Suliswanto, 2015).

Ketimpangan wilayah dapat terjadi akibatnya adanya kegiatan pengkonsentrasian kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kemampuan daerah dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah (Kusuma, 2013). Kesenjangan atau ketimpangan pendapatan akan menimbulkan berbagai permasalahan, permasalahan tersebut dapat berupa peningkatan migrasi dari daerah yang miskin kedaerah yang maju, kriminalitas, konflik antar masyarakat, dan dalam konteks kenegaraan, kesenjangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Davi Eko Prasetyo, 2011). Aglomerasi industri adalah salah satu indikator berkembangnya peranan industri manufaktur di suatu wilayah. Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (syafrizal,2003). Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Selain aglomerasi, tingkat pengangguran yang ada pada suatu wilayah dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah. Semakin besar tingkat pengangguran disuatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, sementara wilayah lain terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan (Erwan,2002). Pengangguran yang terjadi akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang (Nurcholis, 2014).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun tidak terlepas dari ketimpangan wilayah yang terlihat pada PDRB kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang relatif berbeda, ada wilayah yang perkembangan PDRB nya relatif cukup tinggi, kemudian wilayah lain memiliki PDRB yang rendah.

Ketimpangan juga pernah diteliti oleh (Masli, 2006) yaitu tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari awal penelitian tahun 1993-2006 dan menunjukkan arah yang negatif dibandingkan dengan awal tahun penelitian, pada umumnya kabupaten atau kota di Jawa Barat pada periode penelitian tahun 1993-2006 menurut Tipologi Klassen termasuk klasifikasi daerah tertinggal sebesar 36,6% serta daerah berkembang cepat sebesar 32,6%, daerah maju dan tumbuh cepat sebesar 16,3% dan daerah maju tapi tertekan sebesar 14,5%. Hasil penelitian ketiga adalah dari perhitungan data PDRB tahun 1993-2006, dengan menggunakan Indeks Williamson dan Entropi Theil ketimpangan regional cenderung meningkat.

Penelitian lain tentang ketimpangan juga dilakukan oleh (Asman Al Faiz, 2011) dengan variabel penelitiannya antara lain pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, panjang jalan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* dan menggunakan Tipologi Klassen untuk mengukur ketimpangan wilayah. Hasil dari penelitian adalah Dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Sedangkan panjang jalan tidak berpengaruh signifikan dan bernilai positif.

Hubungan aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan juga dilakukan oleh (Bonet, 2006) dengan variabel Desentralisasi fiskal, investasi, aglomerasi. Hasil penelitian adalah Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yaitu alokasi dari porsi utama atas sumber daya lokal baru untuk pengeluaran sekarang (gaji dan upah), investasi infrastruktur dan modal, kurangnya komponen redistribusi dalam transfer nasional, serta kurangnya kapasitas institusional pada pemerintah daerah. Selain itu dua variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan aglomerasi produksi juga berhubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dipaparkan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang sama sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitian, kemudian diharapkan dengan adanya kesamaan variabel dapat membantu mendukung hasil dari penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengambilan

hipotesis yang berbeda pada variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berapa besar tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga kemudian di publikasikan ke masyarakat luas (Kuncoro, 2000). Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik provinsi Kalimantan Timur dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus PDRB perkapita relatif dan analisis regresi data panel yaitu meliputi uji hipotesis yaitu uji f, uji t, dan uji R^2 , sedangkan untuk pemilihan model terbaik menggunakan uji hausman, uji chow, dan uji LM, dan pengujian tersebut menggunakan aplikasi *Eviews*.

Devinisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) dan Atur. J Sigalingging (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Adapun rumus dari pendekatan PDRB per kapita relatif sebagai berikut:

$$IQ_{i,t} = \frac{PDRBPC_{it}}{PDRBPC_{KALTIM,t}} - 1$$

Dimana :

$IQ_{i,t}$ = Ketimpangan wilayah kabupaten/kota i pada tahun t

$PDRBPC_{it}$ = PDRB perkapita Kabupaten/Kota i, pada tahun t

$PDRBPC_{Kaltim,t}$ = PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi, berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi wilayah diukur melalui logaritma natural

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk menangkap perubahan relatif (dibandingkan tahun sebelumnya) dari PDRB per kapita. Yaitu dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$IQ_{i,t} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{t0}}{PDRB_{t0}} \times 100$$

Dimana :

- Yit = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i, tahun t
 $PDRB_{ti}$ = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t
 $PDRB_{t0}$ = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t
 PDRB = PDRB ADHK kabupaten/kota i tahun t-1

Variabel selanjutnya yang digunakan adalah aglomerasi. Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari Share PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut :

$$Ag = \frac{PDRB_{kab/kota}}{PDRB_{Kaltim}}$$

Variabel terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang diartikan yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang yang diinginkannya. Nilai tingkat pengangguran merupakan presentase dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam prode waktu tertentu, sehingga dapat dirumuskan (BPS) :

$$\text{Tingkat pengangguran } th_i = \sum \frac{\text{orang yang mencari pekerjaan}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Pengertian dari orang yang sedang mencari pekerjaan tertentu atau dengan kata lain menganggur adalah seseorang yang tidak bekerja dan sekarang ini mencari sebuah pekerjaan menurut refrensi waktu tertentu, sedangkan pengertian angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Parameter variabel ini adalah persentase.

Hasil dan Pembahasan

Analisa tingkat ketimpangan wilayah, dalam penelitian ini menggunakan rumus PDRB per kapita relatif. Tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur selama 9 tahun pengamatan mengalami fluktuasi. Nilai ketimpangan akan semakin menunjukkan semakin timpang ketika semakin besar atau positif dan akan menunjukkan timpang yang rendah ketika semakin kecil atau bernilai negatif.

Tabel 1

Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Paser	0,34	0,31	0,26	0,07	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02
Kutai Barat	0,51	0,50	0,47	0,28	0,18	0,06	0,04	0,02	0,01
Kutai Kartanegara	0,45	0,46	0,46	0,53	0,46	0,46	0,42	0,38	0,29
Kutai Timur	1,28	1,16	1,22	0,83	0,98	1,05	1,05	1,04	1,06
Berau	0,48	0,49	0,48	0,36	0,27	0,20	0,15	0,10	0,03
PPU	0,61	0,60	0,59	0,75	0,71	0,71	0,69	0,69	0,68
Mahakam Ulu	1,00	1,00	1,00	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,56
Balikpapan	0,22	0,16	0,16	0,18	0,19	0,19	0,17	0,14	0,12
Samarinda	0,52	0,51	0,49	0,67	0,64	0,65	0,64	0,63	0,62
Bontang	4,37	4,15	3,84	1,98	1,59	1,24	1,06	0,96	1,07

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2017

Berdasarkan analisis PDRB perkapita relatif, menunjukkan bahwa di provinsi Kalimantan Timur mengalami tingkat ketimpangan wilayah yang cukup tinggi. Berdasarkan rata-rata nilai PDRB perkapita relatif di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Kota Bontang dengan nilai rata-rata 2,25. Pada posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Kutai Timur dengan nilai rata-rata sebesar 1,07. Posisi ketiga adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai rata-rata sebesar 0,43, kemudian keempat adalah Kabupaten Paser dengan nilai rata-rata -0,12. Posisi kelima ditempati oleh Kota Balikpapan dengan nilai rata-rata sebesar -0,17. Pada posisi keenam ditempati oleh Kabupaten Kutai Barat dengan nilai -0,23, kemudian pada posisi ketujuh ditempati oleh Kabupaten Berau dengan nilai -0,28 dan Kota Samarinda pada posisi kedelapan dengan nilai rata-rata yang sama yaitu sebesar -0,60. Pada posisi kesembilan yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan nilai sebesar -0,67 dan Kabupaten Mahakam Ulu adalah kabupaten yang menempati posisi kesepuluh yaitu sebesar -0,74. Berdasarkan analisis PDRB perkapita relatif Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2007-2015 memiliki nilai rata-rata

yang cukup rendah, hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan wilayah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih rendah.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur diukur menggunakan olah data dengan *eviews*, berikut hasil pengolahan data menggunakan *eviews* :

Tabel 2

Hasil Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : *Eviews* data diolah, 2017

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Coefficient	-0,002414	Coefficient	-0,002176	Coefficient	-0,002178
	t-statistic	-2,036218	t-statistic	-2,097112	t-statistic	-2,109546
	Prb.	0,0452	Prb.	0,0397	Prb.	0,0381
Aglomerasi (X2)	Coefficient	3,001637	Coefficient	12,48992	Coefficient	5,307490
	t-statistic	2,424914	t-statistic	3,287906	t-statistic	2,592521
	Prb	. 0,0177	Prb.	0,0016	Prb.	0,0114
Tingkat Pengangguran(X3)	Coefficient	0,186627	Coefficient	0,144237	Coefficient	0,155846
	t-statistic	5,076695	t-statistic	3,769588	t-statistic	4,263727
	Prb.	0,0000	Prb.	0,0003	Prb.	0,0001
	R-squared	= 0,346714	R-squared	= 0,568390	R-squared	= 0,276769
	Ad R-squared	= 0,321261	Ad R-squared	= 0,499583	Ad R-squared	= 0,248591
	F-statistic	= 13,62190	F-statistic	= 8,260602	F-statistic	= 9,822202
	Prob(F-stat)	= 0,000000	Prob(F-stat)	= 0,000000	Prob(F-stat)	= 0,000015

signifikan 5%

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 2 maka diperoleh model persamaan berikut:

$$\text{Common Effect: } Y=2,3620190,002414X_1+3,001637X_2++0,186627X_3+e$$

$$\text{Fixed Effect: } Y=-3,002176-0,002176X_1+12,48992X_2+0,144237X_3+e$$

$$\text{Random Effect: } Y= -2,328095-0,002178X_1+5,307490X_2+0,155846X_3+e$$

Untuk memilih model terbaik yang digunakan dalam pembahasan digunakan 3 uji, uji pertama yaitu uji chow. Kegunaan uji chow yaitu untuk memilih antara metode OLS (*Common Effect*) tanpa variabel dummy atau metode *Fixed Effect*. Dari hasil perhitungan uji F yakni prob. $0,0002 < 0,05$ taraf signifikansi $\alpha=5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa model *Fixed Effects* merupakan model yang tepat dalam penelitian ini.

Uji berikutnya adalah uji hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effects* atau *Random Effects*. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai prob adalah $0,1062 > 0,05$ dengan

signifikansi sebesar 5%, yang berarti H_0 diterima dengan keputusan model RE lebih tepat digunakan daripada model FE.

Pengujian terakhir yang digunakan untuk memilih model terbaik dalam penelitian ini adalah uji lagrange multiplier (LM). Uji LM digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Dari hasil pengujian didapatkan nilai prob sebesar $0,0013 < 0,05$ taraf signifikansi sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti model FE lebih sesuai daripada model CE untuk data ini.

Dari ketiga uji yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam data ini adalah model *Fixed Effect*.

Selain pemilihan model terbaik, dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik, yaitu uji F dan Uji T, berikut hasil pengujian uji statistik uji F :

Tabel 3
Hasil Uji F

Hipotesis Alternatif	Nilai	Kondisi	Kesimpulan
Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran	F hitung= 8,260602 > F tabel = 2,72	F hitung> F tabel 8,260602 > 2,72	Ha diterima Ho ditolak
Pengaruh berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan	pada $\alpha=5\%$		

Sumber : *Eviews* diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F statistik lebih besar dari nilai f tabel. Hal ini berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan secara simultan.

Uji statistik selanjutnya adalah uji T, berikut hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 4
Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	t-Tabel	Prob	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	-0,002176	0,001038	2,097112	1,833	0,0397	signifikan
Aglomerasi	12,48992	3,798746	3,287906	1,833	0,0016	signifikan
Tingkat Pengangguran	0,144237	0,038263	3,769588	1,833	0,0003	signifikan

Sumber : *Eviews* diolah 2017

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,097112 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0397. Hal ini menunjukkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($2,097112 > 1,833$) dan nilai probabilitas 0,0397 pada $\alpha = 5\%(0.05)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan wilayah.

Hasil kesimpulan yang kedua adalah aglomerasi (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,287906 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0016. Hal ini menunjukkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($3,287906 > 1,833$) dan nilai probabilitas 0,0016 pada $\alpha = 5\%(0.05)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Aglomerasi secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Ketimpangan wilayah.

Hasil kesimpulan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran (X_3) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,769588 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0003. Hal ini menunjukkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($3,769588 > 1,833$) dan nilai probabilitas 0,0003 pada $\alpha = 5\%(0.05)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Ketimpangan wilayah.

Pengujian terakhir adalah Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,568390 atau 56,83% hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Aglomerasi (X_2) dan Tingkat Pengangguran (X_3) dalam menjelaskan variabel terikat Ketimpangan wilayah (Y) yaitu sebesar 0,568390 atau 56,83% sedangkan sisanya ($1-0,568390 = 0,43161$ atau 43,16%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang secara implisit tercermin pada variabel pengganggu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis uji statistik variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya apabila Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1% maka ketimpangan wilayah mengalami penurunan sebesar 0,002176 atau 0,2176%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan turunnya ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori dari (Sjafrizal, 2008) Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan

masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Hal ini berarti salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Propinsi Kalimantan Timur adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik variabel Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya apabila aglomerasi naik sebesar 1% maka ketimpangan wilayah akan naik sebesar 12,48992 atau 124,8992%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan aglomerasi dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga didukung oleh Jaime Bonet (2003) bahwa aglomerasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan aglomerasi adalah pemusatan kegiatan perekonomian sehingga sebisa mungkin aglomerasi harus diratakan disetiap daerah.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya apabila tingkat pengangguran naik sebesar 1% maka ketimpangan wilayah akan naik sebesar 0,144237 atau 14,4237%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan tingkat pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan wilayah. Hal ini didukung oleh Sri Aditya(2007) bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini menunjukkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Propinsi Kalimantan Timur salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

Simpulan dan Saran

Meninjau penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Tingkat ketimpangan wilayah berdasarkan analisis PDRB perkapita relatif di Provinsi Kalimantan Timur adalah masih dalam kategori lemah, namun ada juga beberapa daerah yang memilik tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi hasil dari uji statistik adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah Propinsi Kalimantan Timur, kemudian untuk variabel Aglomerasi hasil dari uji statistik adalah aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Propinsi Kalimantan Timur, dan variabel Tingkat Pengangguran berdasarkan hasil uji statistik adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Melihat hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan sumber daya dan mendorong sektor unggulan yang ada pada wilayah agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada PDRB sehingga dapat mengurangi ketimpangan wilayah.

Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, maka sebaiknya pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mengurangi meningkatnya aglomerasi dan tingkat pengangguran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meratakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). Kesenjangan dan konvergensi ekonomi antar kabupaten pada empat koridor di propinsi Jawa Timur, *IV*, 154–164.
- Asman Al Faiz. (2011). ANTAR WILAYAH MENURUT TIPOLOGI KLASSEN PADA 25 KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA SKRIPSI.
- Bonet. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities.
- Davi Eko Prasetyo. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Di Kabupaten Jember Tahun 2008-2011. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kuncoro, M. (2000). DAN KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS , 1993-2000, 97–110.
- Kusuma, H. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 1–11.
- Lailatul Khusnah. (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13.
- Masli, L. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Economic Development*, (32), 1–14. Retrieved from http://stan-im.ac.id/jsma/pdf/vol1/ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR KABUPATEN-KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT.pdf
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur, 79–93.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Susilowati, D., Sri, M., & Suliswanto, W. (2015). Manusia , Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia)*, 6, 89–106.
- Todaro. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.